



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Kramatjati Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman : www.bphn.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : PHN.HN.04.03-36
TENTANG
VERIFIKASI DAN AKREDITASI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM BARU
PERIODE TAHUN 2025 s.d. 2027**

Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, maka dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM membuka kesempatan kepada Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, atau Organisasi lainnya yang memenuhi syarat untuk bergabung sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027.

I. KEBUTUHAN DAN PERSYARATAN

A. KEBUTUHAN

Kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum ditetapkan oleh Kepala BPHN, dengan mempertimbangkan :

1. Kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum disetiap Kabupaten/Kota
2. Kabupaten/Kota yang sudah terdapat Pemberi Bantuan Hukum mempertimbangkan jumlah Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi yang ada pada periode sebelumnya

B. PERSYARATAN

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki Kantor atau Sekretariat tetap
3. Memiliki Pengurus yang meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, dan Tenaga Administrasi
4. Memiliki Program Bantuan Hukum
5. Memiliki minimal 1 (satu) Advokat yang memiliki izin beracara yang sah dan berlaku
6. memiliki minimal 3 (tiga) Paralegal yang aktif
7. Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi
8. Lainnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Tahun 2023 Nomor PHN-HN.04.03-812 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum (diunduh di www.sidbankum.bphn.go.id)

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id.

III. WAKTU PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran **tanggal 1 Maret s.d. 22 Maret 2024**
- B. Verifikasi kelengkapan dan verifikasi dokumen fisik **tanggal 1 Maret s.d. 25 Maret 2024**
- C. Perbaikan ketidaklengkapan dokumen **paling lambat selesai tanggal 23 April 2024**
- D. Pemeriksaan faktual lapangan **paling lambat selesai tanggal 16 Mei 2024**

IV. TAHAP-TAHAP SELEKSI

- A. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan klik “*Daftar Verasi*”
- B. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap dokumen pendaftaran yang telah diinput dilakukan melalui Aplikasi Verasi
- C. Pemeriksaan Dokumen Fisik dilakukan dengan cara Calon Pemberi Bantuan Hukum datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat, guna melakukan pencocokan antara dokumen pendaftaran yang diisi pada aplikasi dengan dokumen asli atau fotokopi dokumen yang sudah di legalisir

- D. Pemeriksaan Faktual Lapangan dilakukan melalui survei lapangan terhadap kantor atau sekretariat Calon Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bersama Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja Daerah atau masing-masing
- E. Penetapan Akreditasi dilakukan terhadap Calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos pemeriksaan Kelengkapan Dokumen, pemeriksaan Dokumen Fisik, dan pemeriksaan Faktual Lapangan serta direkomendasikan oleh Kelompok Kerja Daerah kepada Panitia Verifikasi dan Akreditasi melalui Kelompok Kerja Pusat
- F. Rekomendasi dari Kelompok Kerja Daerah dilakukan verifikasi kembali oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dibantu Kelompok Kerja Pusat guna menetapkan kelolosan Calon Pemberi Bantuan Hukum
- G. Calon Pemberi Bantuan Hukum yang dinyatakan lolos direkomendasikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027
- H. Pemberian sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal, 29 Januari 2024

Ketua Panitia Verifikasi dan Akreditasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
- Febranto (082364216203), Hermansyah (082176947596)